

Tinjauan Mata Kuliah

Mata kuliah yang akan kita pelajari dalam *Buku Materi Pokok ADPU4332* ini bernama hukum administrasi negara (HAN). Ruang lingkup mata kuliah HAN meliputi pokok-pokok bahasan yang akan dikaji secara lebih terperinci dalam Modul 1 sampai dengan Modul 9 sebagai berikut.

1. Modul 1: Pengertian Hukum Administrasi Negara

Modul ini membahas pengertian hukum, pengertian administrasi negara, perubahan paradigma dalam administrasi negara, aliran-aliran dalam administrasi negara, perbedaan antara paradigma *beareaucratic* dan *post bureaucratic*, pengertian hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara, teori residu, perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sumber-sumber hukum administrasi negara, serta fungsi dari hukum administrasi negara.

2. Modul 2: Instrumen Hukum Administrasi Negara

Modul ini membahas jenis-jenis model operasi pemerintahan, jenis instrumen pemerintah, syarat-syarat pembuatan peraturan perundang-undangan, syarat-syarat pembuatan ketetapan, syarat-syarat pembuatan kebijaksanaan, syarat-syarat pembuatan rencana-rencana, dan syarat-syarat pengenaan sanksi-sanksi.

3. Modul 3: Aparatur Negara

Modul ini membahas apa yang dimaksud dengan kekuasaan keempat (*de vierde macht*), siapa saja yang dimaksud sebagai aparatur negara dan pejabat negara, pegawai negeri sipil, jabatan negeri, jabatan karier dan jabatan nonkarier, serta membahas kenaikan pangkat reguler dan pilihan.

4. Modul 4: Pengelolaan Barang Milik Negara

Modul ini membahas perencanaan kebutuhan dan penganggaran serta barang milik negara, mulai dari tata cara pengadaannya, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, pengaturan penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, serta pengawasan dan pengendaliannya.

5. Modul 5: Perlindungan Hukum bagi Masyarakat (*Rechtsbescherming*)

Modul ini membahas pengertian, luas lingkup, jenis perlindungan hukum, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah, keberatan administrasi, banding administrasi, lembaga ombudsman, dan peradilan tata usaha negara.

6. Modul 6: Hukum Pengelolaan Keuangan Negara

Modul ini membahas pengertian keuangan negara, APBN, keuangan daerah, pengertian kerugian negara, prosedur penyelesaian kerugian negara, pertanggungjawaban keuangan negara, pengawasan keuangan negara, dan sanksi-sanksi hukum dalam penyelenggaraan keuangan negara.

7. Modul 7: Hukum Keterbukaan Informasi Publik

Modul ini membahas pengertian informasi publik, pengertian administrasi negara, perubahan paradigma dalam administrasi negara, pengertian hukum administrasi negara, ruang lingkup hukum administrasi negara, teori residu, perbedaan antara hukum tata negara dan hukum administrasi negara, sumber-sumber hukum administrasi negara, serta fungsi dan hakikat utama dari hukum administrasi negara.

8. Modul 8: Pengertian Hukum Pelayanan Publik

Modul ini membahas pengertian pelayanan publik, pengertian hukum pelayanan publik, ruang lingkup hukum pelayanan publik, penyelesaian sengketa, aduan malaadministrasi dalam pelayanan publik.

9. Modul 9: Hukum Kesejahteraan Sosial

Modul ini membahas pengertian hukum kesejahteraan sosial, makna rehabilitasi sosial, makna jaminan sosial, makna pemberdayaan sosial, makna perlindungan sosial, penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

PETUNJUK CARA MEMPELAJARI BMP

Agar mendapatkan hasil yang baik, Anda harus mempelajari BMP ini dengan tahapan berikut.

1. Pelajari modul secara berurutan atau secara hierarki.
2. Pelajari setiap tujuan instruksional khusus dari setiap pokok bahasan agar Anda mengetahui apa yang diharapkan setelah Anda selesai mengikuti pokok bahasan yang bersangkutan.
3. Pelajari materi yang ada pada setiap modul.
4. Kerjakan setiap latihan pada setiap kegiatan belajar agar Anda lebih memahami penekanan-penekanan setiap kegiatan belajar.
5. Kerjakan setiap tes formatif yang ada pada setiap kegiatan belajar, kemudian cocokkan dengan kunci jawaban untuk mengetahui tingkat penguasaan Anda.

Peta Kompetensi
Hukum Administrasi Negara/ADPU4332/3 sks

